

Agile Governance dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Tahun 2021

Isnaeni Yuliani^{a,1,*}, Laras Ayu Pratiwi^{b,2}

^aUniversitas Terbuka Tangerang Selatan, ^bUniversitas Krisnadwipayana Jakarta

¹isnaenyuliani@ecampus.ut.ac.id*; ²larasayupratiwi27@gmail.com

*corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has affected various sectors and spread widely to various countries, including Indonesia. The fluctuating development of Covid-19 in Bekasi City has caused the Bekasi City Government to implement various policies and efforts to handle Covid-19 in Bekasi City so that it does not have a bad impact. Not only that, the synergy of various parties and stakeholders has formed a collaboration in handling Covid-19 in Bekasi City. In this study, researchers analyzed Agile Governance in Handling Covid-19 in Bekasi City in 2021 using agile governance theory. According to Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Marcello L. G. do E. Pedrosa, Humberto R. de Almeida Neto, and Hermano P. de Moura, there are 6 (six) principles of agile governance, namely good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach and simple design and continuous refinement. The research method used is qualitative research. Data collection techniques used in this study, namely observation, interviews, and documentation. Based on the results of this study, it shows that the application of agile governance in handling Covid-19 in Bekasi City in 2021, when viewed from the agile governance principles, has achieved very good results. The Bekasi City Government has been alert, fast, and responsive in responding to the Covid-19 pandemic in the Bekasi City area. The Bekasi City Government is also adaptive in implementing various policies in response to unexpected changes.

Keywords

Agile
Governance
Covid 19
Bekasi

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menyebar luas ke berbagai negara dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, tanpa kecuali di Indonesia. Kasus Covid-19 menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Bekasi, Jawa Barat. Kasus pertama Covid-19 muncul di Kota Bekasi pada tanggal 30 Maret 2020 dan jumlahnya terus meningkat hingga 90% dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal ini berdampak pada jumlah ketersediaan kapasitas tempat tidur di rumah sakit yang semakin menipis.

Dalam merespons penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Bekasi menerapkan kebijakan PSBB tahap I yang berlangsung pada 15 April 2020 – 28 April 2020, masih banyak pengendara yang melanggar aturan berlaku. Selanjutnya, pelaksanaan PSBB tahap II lebih diperketat, yakni (a) Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan sanksi khusus kepada masyarakat Kota Bekasi yang tidak menggunakan masker, dan (b) bagi masyarakat Kota Bekasi yang bepergian dan pengendara yang berasal dari luar Kota Bekasi akan menjalani pemeriksaan secara detail ketika hendak melintasi wilayah Kota Bekasi. Jika para pengendara tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka akan mendapatkan surat tilang. Pada pelaksanaan PSBB tahap III yang dilaksanakan pada 13 Mei 2020 – 26 Mei 2020 terdapat sanksi administratif berupa teguran secara lisan, sanksi sosial, denda hingga puluhan juta, serta penutupan tempat usaha.

Setelah penerapan perpanjangan PSBB tahap III, masih banyak ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi hingga akhirnya diperlukan perpanjangan PSBB tahap IV yang dilaksanakan pada 30 Mei 2020 – 4 Juni 2020 yang pada masa ini juga mulai disosialisasikan dalam adaptasi kebiasaan baru (*new normal*). Seiring perkembangan dari kasus Covid-19 di Kota Bekasi yang belum melandai, maka kebijakan PSBB diperpanjang, yakni PSBB tahap V yang berlangsung pada 5 Juni 2020 – 2 Juli 2020 dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Dalam pelaksanaan PPKM berbasis mikro terdapat beberapa standardisasi terhadap protokol kesehatan, yaitu adanya pembatasan jam operasional pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada pelaksanaan PPKM darurat, terdapat adanya pengetatan aktivitas masyarakat, seperti kegiatan belajar mengajar diselenggarakan secara *online*, kegiatan pada sektor non-esensial menerapkan sistem kerja 100% *Work From Home (WFH)*, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan PPKM level 4, tingkat keterisian tempat tidur (*Bed Occupancy Rate*) bagi pasien Covid-19 di rumah sakit semakin menurun berakibat angka kesembuhan pasien Covid-19 dan zona hijau bagi penularan Covid-19 semakin meningkat di tingkat Rukun Tetangga (RT). Selanjutnya, pada pelaksanaan PPKM Level 3 di Kota Bekasi terdapat adanya perkembangan dari penurunan jumlah Covid-19 sehingga Pemerintah Kota Bekasi memperbolehkan aktivitas masyarakat, seperti sekolah tatap muka yang dilakukan secara terbatas, jam operasional pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya, tetapi belum ada perubahan yang signifikan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

Selanjutnya, dengan adanya perkembangan dari total kasus Covid-19 di Kota Bekasi yang mengalami penurunan, maka Kota Bekasi telah ditetapkan sebagai wilayah dengan penerapan PPKM level 2 dan sekitar 99,65% RT di wilayah Kota Bekasi sudah berstatus zona hijau. Pada program vaksinasi Covid-19, dengan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 agar terbentuknya *herd immunity* (kekebalan kelompok).

Ditengah situasi pandemi covid-19 yang sangat dinamis, pemerintah dituntut untuk responsive dalam mampu mengambil langkah yang cepat dan tepat. Prinsip *Agile Governance* menjadi hal yang vital untuk merespon tantangan yang ada. Adapun definisi dari *Agile Governance* (pemerintahan yang tangkas, gesit) yaitu kemampuan sebuah organisasi dalam merespons secara cepat dari perubahan yang tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Menurut Alexander J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Marcello L. G. do E. Pedrosa, Humberto R. de Almeida Neto dan Hermano P. de Moura, dalam mendorong adanya praktik *agile governance* terdapat prinsip-prinsip di dalamnya, yaitu (a) *good enough governance* (tata kelola yang cukup baik): tingkatan pada tata kelola menyesuaikan dengan lingkungan organisasi, (b) *business driven* (berbasis bisnis): sebuah bisnis menjadi suatu alasan pada setiap keputusan dan tindakan, (c) *human focused* (fokus pada manusia): seseorang harus merasa dihargai dan didorong untuk dapat terlibat dalam partisipasi, (d) *based on quick wins* (berdasarkan kemenangan cepat): sebuah kemenangan secepatnya harus dirayakan agar bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak dorongan dan hasil, (e) *systematic and adaptive approach* (pendekatan sistematis dan adaptif): suatu tim harus mampu mengembangkan kemampuan internal sehingga menjadi sistematis dan adaptif dalam menyikapi setiap perubahan, (f) *simple design and continuous refinement* (desain sederhana dan penyempurnaan secara berkelanjutan): dalam suatu tim harus mampu memberikan hasil dengan cepat dan selalu mengalami adanya peningkatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena dari penelitian yang diteliti. Menurut Denzin & Lincoln, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena apa yang terjadi dan penelitian tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai macam metode yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam hal ini, bentuk pendekatan yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena dari penelitian yang diteliti. Menurut Denzin & Lincoln, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena apa yang terjadi dan penelitian tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai macam metode yang ada.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, studi literature yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing* atau *verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Agile Governance* dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi

Perkembangan kasus Covid-19 yang sangat dinamis memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor sehingga pemerintah dituntut dapat mengambil langkah-langkah *aglie*. Konsep *agile governance* memiliki 6 (enam) prinsip, yaitu *good enough governance*, *business driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach*, serta *simple design and continuous refinement*.

Pertama, prinsip *good enough governance* menitikberatkan pada tujuan dari pemerintahan yang baik. Indikator yang mempengaruhi, antara lain (a) partisipasi masyarakat (*participation*): dalam penerapan protokol kesehatan, melaksanakan program vaksinasi Covid-19, dan memberikan edukasi terkait Covid-19 menjadi bagian dari pencegahan Covid-19 karena dapat berdampak pada fluktuasi perkembangan kasus Covid-19 di Kota Bekasi., (b) transparansi (*transparency*): dengan adanya transparansi dari data kasus Covid-19 dapat memberikan informasi secara *up to date* mengenai perkembangan Covid-19 di Kota Bekasi, (c) visi strategis: pemetaan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang dalam penanganan Covid-19 sehingga diperlukan target sebagai rencana yang akan dicapai. Dalam penanganan Covid-19, salah satunya program vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi memiliki rencana jangka pendek yaitu percepatan vaksinasi Covid-19 pada lansia. Adapun rencana jangka panjang pada program vaksinasi Covid-19 yaitu jika sudah memasuki fase endemi, maka tetap mengedukasi masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan prinsip *good enough governance*, keseluruhan yang menjadi tujuan dalam mencapai pemerintahan yang baik menunjukkan hasil yang sangat baik dan dapat menjadi salah satu indikator dari pencapaian Pemerintah Kota Bekasi agar penanganan Covid-19 di Kota Bekasi semakin lebih baik.

Kedua, prinsip *business driven* menitikberatkan pada penyelesaian masalah yang timbul dan dasar pengambilan keputusan dari kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan Covid-19 di Kota Bekasi. Dalam penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi memberikan dampak yang dirasakan, salah satunya bagi pelaku UMKM. Menanggapi hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bekasi memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari bentuk dukungan Pemerintah Kota Bekasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat. dengan adanya hal tersebut, maka berdampak pada pemulihan ekonomi secara perlahan-lahan kembali pulih. Selanjutnya, berdasarkan prinsip *business driven* sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan adanya pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM dan masyarakat, maka membuat pertumbuhan ekonomi ekonomi ikut berkembang.

Ketiga, prinsip *human focused* menitikberatkan pada pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan berbagai pihak yang berasal dari Pemerintah Kota Bekasi dan unsur lainnya yang bukan berasal dari Pemerintah Kota Bekasi. Dalam merespon penanganan Covid-19 di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi memberikan pelayanan dan fasilitas bagi pasien Covid-19 agar mendapatkan perawatan yang sesuai dengan penanganan Covid-19. Dengan memberikan penanganan yang tepat dapat menyelamatkan banyak jiwa. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi surat edaran No. 440/5081/DINKES tentang penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19 bagi masyarakat Kota Bekasi yang berisi 7 (tujuh) poin, salah satunya yaitu biaya pelayanan kesehatan pasien Covid-19 ditanggung oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Selanjutnya, bagi pasien Covid-19 dengan *co-insidens* (suatu keadaan terdapat 2 penyakit atau lebih dalam satu perawatan pelayanan Covid-19 secara bersamaan), maka pembiayaan *co-insidens*-nya dari pihak asuransi kesehatan yang dimiliki pasien yang akan membayarnya. Adapun dengan adanya kebijakan tersebut, turut membantu masyarakat dalam hal pembiayaan rumah sakit bagi pasien Covid-19 sehingga pasien tersebut tetap mendapatkan perawatan yang maksimal agar pulih kembali. Berdasarkan prinsip *human focused*, dalam merespons penanganan Covid-19 di Kota Bekasi sudah sangat baik dan saling bahu membahu bekerja sama dengan berbagai pihak dan stakeholder serta saling bersinergi dalam penanganan Covid-19 di Kota Bekasi.

Keempat, prinsip *based on quick wins* menitikberatkan pada layanan informasi penanganan Covid-19 di Kota Bekasi melalui website <http://corona.bekasikota.go.id> yang dapat diakses oleh masyarakat

dan informasinya up to date terkait perkembangan Covid-19 di Kota Bekasi. Jika mengacu pada prinsip *based on quick wins* ini, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yakni pada akses informasi Covid-19 di Kota Bekasi dengan harapan melalui aplikasi yang dapat diinstal dapat memudahkan mengakses kapan saja dan dimana saja.

Kelima, prinsip *systematic and adaptive approach* menitikberatkan pada penanganan di Kota Bekasi diperlukan evaluasi terkait implementasi penanganan yang sudah dilaksanakan, salah satunya yaitu pada program vaksinasi Covid-19. Pada program vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, hal yang perlu ditingkatkan, yaitu (a) cakupan vaksinasi Covid-19 diperluas dan (b) melaporkan identitas dan domisili, sedangkan hal yang perlu diperbaiki yaitu data yang ada di wilayah dikeluarkan kembali dan harus *sesuai by name by address* untuk dilakukan vaksinasi Covid-19 bagi yang belum. Berdasarkan prinsip *systematic and adaptive approach* sudah sangat baik. Dengan adanya evaluasi, maka dapat memberikan rekomendasi keputusan lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pengambilan keputusan dari program atau kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan.

Keenam, prinsip *simple design and continuous refinement* menitikberatkan jika terjadi penurunan kasus Covid-19, maka diperlukan langkah untuk merumuskan dan menyusun rencana transisi kebijakan dari fase pandemi Covid-19 menuju fase endemi. Dalam mencapai fase endemi, membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan dan tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19 kembali. Berdasarkan prinsip *simple design and continuous refinement* sudah terpenuhi dengan adanya perumusan dan penyusunan rencana transisi kebijakan menuju fase endemi Covid-19 sebagai strategi menghadapi fase endemi Covid-19. Strategi tersebut diperlukan agar lebih siap menghadapi fase endemi Covid-19.

Berdasarkan analisis prinsip *agile governance* terhadap perubahan kebijakan selama penanganan Covid-19 di Kota Bekasi tampak bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah *agile* (gesit), responsif, dan tanggap dalam menangani pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Bekasi juga menerapkan berbagai kebijakannya secara adaptif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, kerjasama berbagai *stakeholder* dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 merupakan kolaborasi bersama untuk mengatasi pandemi Covid-19. Hal ini juga berdampak pada pemulihan ekonomi seiring terkendalinya pandemi Covid-19. Adapun diperlukan peningkatan di bagian prinsip *based on quick wins*.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Penerapan Agile Governance Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung dari penanganan Covid-19 di Kota Bekasi, yaitu:

- a. Adanya kerjasama dan dukungan lintas sektor menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk saling bekerja sama dalam melakukan pencegahan, pengendalian, dan penanganan Covid-19 di Kota Bekasi agar mencapai tujuan bersama, yakni penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan ekonomi.
- b. Adanya dukungan dari UMKM, mall, dan pasar tradisional yang menyiapkan tempat untuk lokasi vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 di Kota Bekasi yaitu:

- a. Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan resmi. Hal ini tentunya mempercepat potensi penularan dan penyebaran Covid-19 di lingkungan sekitar.
- b. Terbatasnya tenaga kesehatan. Dalam penanganan Covid-19, tenaga kesehatan berada di garis terdepan. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan pantang menyerah menangani pasien Covid-19 dan bertarung melawan keganasan Covid-19. Rasa kekhawatiran dari tenaga kesehatan semakin melanda, ketika berhadapan saat menangani pasien Covid-19 karena dapat mengancam nyawanya. Meningkatnya pasien Covid-19 menjadi dampak dari adanya kenaikan kasus Covid-19.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai *Agile Governance* Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Tahun 2021, maka dapat disimpulkan implementasi dari *agile governance* dalam penanganan Covid-19 di Kota Bekasi secara umum sudah menunjukkan hasil yang cukup baik baik, *agile* (gesit), Kesehatan80, tanggap, dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi secara tidak terduga-duga. Meskipun demikian, masih ada hal yang perlu ditingkatkan khususnya dalam penerapan prinsip *based on quick wins* diperlukan peningkatan akses informasi agar keterbukaan informasi mengenai Covid-19 di Kota Bekasi menjadi lebih baik. Adapun yang menjadi Keseha pendorong dalam penanganan Covid-19 di Kota Bekasi antara lain adanya Kesehatan dan dukungan lintas Keseha menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk saling bekerja sama dalam melakukan pencegahan, pengendalian, dan penanganan Covid-19 di Kota Bekasi, serta adanya dukungan dari UMKM, mall, dan pasar tradisional yang menyiapkan tempat untuk lokasi vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi. Sedangkan yang menjadi Keseha penghambat dalam penanganan Covid-19 di Kota Bekasi, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Kesehata Kesehatan dan terbatasnya tenaga Kesehatan.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan mengenai *Agile Governance* dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Tahun 2021, maka saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini antara lain: Pemerintah harus lebih cepat merespon, tanggap, dan adaptif dalam menghadapi setiap fenomena yang terjadi, salah satunya penanganan Covid-19 agar tidak berdampak buruk terhadap peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya Covid-19 dan pencegahan Covid-19 serta mengadakan rekrutmen lowongan bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi tenaga kesehatan yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, S. (2020). Melalui Pandemi Dengan Organisasi Dan Kebijakan Publik Yang Agile. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(1).
- [1] Amin Leiman, *Agile Done Well "Tulus Untuk Produktif"*, ed I Ketut Gunarta (Surabaya: ITS Tekno Sains, 2019), hlm. 1.
- [2] Apriliyanti, K., Latif, M. D. I., & Mutiarin, D. (2021). Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya. *Jurnal Transformativ*, 7(1), 1-28.
- [3] Haboddin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- [4] Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 48-67.
- [5] Janssen, M., & Van Der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55, 102180, 1-7.
- [6] Kiahno, E. (2021). Analisis Aplikasi Teko-Cak melalui Agile Governance Sebagai Perubahan Peningkatan Disiplin Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya. 1-11.
- [7] Kurniawan, D. I., Maulana, A., & Wicaksono, I. *Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah*. 2.
- [8] Mamik, M. Choroel Anwar (Ed.). 2015. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.

- [9] Putri Larasaty, dkk. 2020. Hasil Survei Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (7-14 September 2020). BPS RI.
- [10] Rofiyanti, E., Dewantoro, B., Agustina, D., Rulandari, N., & Razikin, K. (2021). Agile Governance in the Perspective of Public Services Through the Public Complaints Channel Handling People with Social Welfare Problems (PMKS) in South Jakarta. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 6242-6250.
- [11] Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Laporan Analisis Data Covid-19 Indonesia (update Per 25 Oktober 2020).
- [12] Sharma, S., Sarkar, D., & Gupta, D. (2012). Agile Processes and Methodologies: A Conceptual Study. *International Journal on Computer Science & Engineering (IJCSSE)*, 4(5), 892, 3-4.
- [13] Siagian, Ade Onny, dkk. 2021. Agile Manajemen. Insan Cendekia Mandiri.
- [14] Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- [15] Vernanda, R. (2019). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 (KNIA 4.0)*, 3(1), 2.